



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA SURABAYA TAHUN 2007

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, maka berikut diinformasikan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya tahun 2007 yang digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2007 merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan.

A. GAMBARAN UMUM KOTA SURABAYA

Kota Surabaya secara geografis berada di 7° 9' – 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' – 112° 57' Bujur Timur, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 – 6 meter di atas permukaan laut, sebagian lagi pada sebelah Selatan merupakan kondisi berbukit-bukit dengan ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut.

Luas wilayah Kota Surabaya ± 52.087 Ha, dengan 63,45 persen atau 33.048 Ha dari luas total wilayah merupakan daratan dan selebihnya sekitar 36,55 persen atau 19.039 Ha merupakan wilayah laut yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. Secara administratif wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 163 Kelurahan.



Jumlah penduduk Kota Surabaya yang terdaftar di Kartu Keluarga hingga Desember 2007 adalah 2.861.928 jiwa atau sebanyak 755.914 Kepala Keluarga. Komposisi penduduk kota Surabaya pada Tahun 2007 berdasarkan jenis kelamin adalah se-banyak 1.437.682 jiwa penduduk laki-laki (50,23 persen) dan 1.424.246 (49,77persen) jiwa penduduk perempuan. Komposisi penduduk Kota Surabaya berdasarkan kelompok umur/struktur usia pada tahun 2007 dapat dijelaskan sebagai berikut, proporsi terbanyak adalah pada kelompok usia 26-35 Tahun (557.865 jiwa), selanjutnya adalah pada kelompok usia 36-45 Tahun (524.829 jiwa) dan 46-59 Tahun (464.205 jiwa).

Komposisi penduduk kota Surabaya pada tahun 2007 berdasarkan profesi dapat dijelaskan bahwa terbanyak adalah pegawai swasta sejumlah 684.581 jiwa, selanjutnya adalah sebagai ibu rumah tangga sejumlah 527.343 jiwa dan sebagai pelajar sebanyak 448.511 jiwa. Komposisi penduduk kota Surabaya berdasarkan pendidikan pada tahun 2007 terbanyak adalah pada tingkat pendidikan SLTA (772.133 jiwa) kemudian SD (769.728 jiwa) serta tidak sekolah (616.240 jiwa).

Kota Surabaya merupakan pasar potensial yang didominasi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Industri Pengolahan. Sektor-sektor ini tersebut menguasai 37persen kegiatan ekonomi Surabaya, sehingga menyebabkan menjadi sektor andalan. Kota Surabaya sebagai pusat perdagangan yang melayani wilayah Timur Indonesia dengan didukung tumbuhnya pasar tradisional dan pasar modern (Supermall) yang semakin menarik untuk wisata belanja hingga Tahun 2007. Pasar modern yang ada di Kota Surabaya sebanyak 331 unit.

Sektor tersier khususnya sektor hotel dan restoran sangat berperan dalam menunjang kegiatan bisnis dan kepariwisataan. Sampai dengan Tahun 2007 jumlah hotel berbintang dan non bintang sebanyak 148 unit, sedangkan jumlah restoran dan rumah makan sebanyak 1.517 buah.

Potensi unggulan yang dimiliki Kota Surabaya merupakan produk yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Usaha ini bukan hanya berfungsi dalam penyerapan tenaga kerja, namun terbukti



sebagai suatu bentuk kegiatan usaha yang memiliki fleksibilitas dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa produk unggulan yang ada antara lain makanan dan minuman, pakaian jadi, kerajinan tangan, furniture dan olahan hasil laut.

Potensi lainnya yang dimiliki Kota Surabaya untuk menuju kota dagang dan jasa adalah kenyamanan warga kota, wisatawan dan pelaku bisnis yang datang menjadi kerasan untuk tinggal lebih lama karena kondisi kota yang aman, bersih dan indah. Penataan taman dan ruang terbuka hijau semakin mempercantik Kota Surabaya yang menyuguhkan keindahan sekaligus kenyamanan untuk rekreasi warga Kota Surabaya. Taman Bungkul, Taman Flora dan Taman Persahabatan serta taman-taman lainnya merupakan potensi unggulan Kota Surabaya disamping tempat wisata lainnya yang telah ada sebelumnya antara lain Kebun Binatang Surabaya, Tugu Pahlawan dan Taman Hiburan Pantai Kenjeran. Selain itu wisata religi Masjid Ampel, Masjid Cheng Ho dan Masjid Agung Al Akbar memberi nuansa agamis masyarakat Surabaya.

Kondisi ekonomi daerah secara umum ditunjukkan antara lain oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi dan investasi. Pertumbuhan nilai PDRB mampu memberi gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Membaiknya per-ekonomian secara makro menghasilkan PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2007 sebesar Rp. 124.347,24 milyar .

Jumlah PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 20067 telah mencapai Rp. 67.738,51 milyar dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,38persen atau sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2006 yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,35persen, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya lebih tinggi dari pada tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur sebesar 5,6 persen dan pertumbuhan nasional sebesar 5,5persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada sub sektor sewa bangunan (13,80 persen), air bersih (12,91 persen) dan komunikasi (11,23 persen).



Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi 36,97 persen dan tingkat pertumbuhan 10,43 persen menjadi sangat dominan perannya dalam pembentukan PDRB kemudian diikuti oleh sektor Industri Pengolahan serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

Sektor perdagangan berkembang cukup pesat dan menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari nilai ekspor pada tahun 2007 sebesar 11.476.675.627 US \$ sedangkan nilai impor sebesar 7.606.630.962 US \$ dengan tujuan ekspor dan asal impor terbesar adalah ke negara Asia, Amerika dan Eropa. Sampai dengan tahun 2007 jumlah penanam modal yang tercatat di Kota Surabaya terdiri dari 286 PMA dan 359 PMDN.

Perkembangan perekonomian Kota Surabaya cukup menggembirakan meskipun secara makro telah terjadi krisis energi dan tekanan inflasi barang/jasa. Letak Kota Surabaya yang cukup strategis untuk perdagangan, ekspor dan impor serta kondisi sosial masyarakat yang relatif kondusif, menghasilkan iklim perekonomian yang cukup stabil dan bergairah. Budaya belanja atau gaya hidup konsumtif yang dimiliki masyarakat Kota Surabaya dan budaya hidup praktis ikut menyuburkan sektor perdagangan.

Untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan harga, Pemerintah Kota Surabaya merevisi Upah Minimum Kota (UMK) sesuai inflasi yang terjadi di daerah serta melakukan operasi pasar. Pemerintah Pusat juga turut andil dalam meningkatkan daya beli masyarakat yang memberikan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin. Pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Raskin (beras untuk orang miskin) yang secara tidak langsung juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat golongan berpendapatan rendah.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surabaya tahun 2007 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 –2010, dengan visi **SURABAYA CERDAS DAN PEDULI** atau *Surabaya Smart and Care*.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 8 misi pembangunan yang harus ditempuh, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah *Greater Surabaya* dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem IT yang memadai.
3. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi pengembangan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, investasi serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial masyarakat.
5. Mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.
6. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berwawasan global dan terjangkau bagi warga kota serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat.
8. Menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis dan bertoleransi.



Strategi dan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2007 yaitu:

1. Pada sisi pendapatan daerah, peningkatan pendapatan diarahkan pada optimalisasi potensi penerimaan daerah dengan menghindari upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat.
2. Pada sisi penggunaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan belanja juga diarahkan pada penyediaan dan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur serta penanggulangan masalah sosial.
3. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan guna mencukupi defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, digunakan untuk memenuhi kewajiban angsuran hutang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah.

C. URUSAN DESENTRALISASI

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2007 berikut adalah uraian pencapaian pelaksanaan program-program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kota Surabaya Tahun 2006-2010.



1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan. Sasaran yang dicapai dalam pelaksanaan program tersebut yaitu:

- a. Meningkatnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal atau SPM pendidikan yang diukur dengan menggunakan tiga indikator yaitu :

Persentase angka kelulusan.

Angka kelulusan menggambarkan banyaknya siswa pada tiap jenjang pendidikan yang lulus dibandingkan dengan jumlah seluruh siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir. Pada tahun anggaran 2007, rata-rata persentase kelulusan siswa di Kota Surabaya mencapai 99,13 persen. Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dari 42.730 siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 42.433 siswa yang lulus, jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dari 38.401 siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 38.349 siswa yang lulus dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dari 37.841 siswa yang mengikuti ujian tingkat akhir sebanyak 37.176 siswa yang lulus.

Persentase kompetensi guru.

Persentase kompetensi guru menggambarkan angka relatif banyaknya guru yang memenuhi tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki dan kompetensi mengajar dibandingkan dengan jumlah guru yang ada. Pada tahun 2007, jumlah guru yang memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebanyak 25.542 guru atau 82,10 persen. Tingkat pendidikan guru di masing-masing jenjang pendidikan yang sesuai dengan ketentuan untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dari 12.714 guru sebanyak 9.608 guru, untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dari 9.239 guru sebanyak 8.384 guru, dan untuk Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah dari 9.157 guru sebanyak 7.550 guru.



Persentase siswa kejuruan yang diterima bekerja.

Sekolah kejuruan diadakan untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan lulusan sekolah dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja terampil.

Pada tahun 2007, siswa kejuruan yang diterima bekerja sebanyak 9.104 siswa. Sedangkan target yang ditetapkan tahun 2007 sebanyak 9.100 siswa, dengan demikian kinerjanya mencapai 100,04 persen.

- b. Meningkatnya pemerataan pendidikan pada semua jenjang, yang diukur dengan empat indikator, yaitu:

Angka melek huruf.

Pemberantasan buta aksara diselenggarakan melalui jalur pendidikan luar sekolah di kota Surabaya dengan tujuan untuk meningkatkan angka melek huruf.

Pada tahun 2007, jumlah penduduk Kota Surabaya di atas usia 15 tahun, tercatat sebanyak 2.632.518 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.553.626 jiwa yang melek huruf atau 97 persen. Upaya yang dilakukan untuk mendukung proses pendidikan luar sekolah antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Kejar Paket A/B dan pembinaan tutor.

Persentase Angka Partisipasi Murni.

Angka Partisipasi Murni menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah atau usia 7 sampai dengan 18 tahun pada daerah tertentu ditunjukkan dengan formulasi perbandingan jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada semua jenjang pendidikan pada waktu tertentu.

Pada tahun 2007, persentase Angka Partisipasi Murni di Kota Surabaya untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar 92,92 persen, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar 79,85 persen dan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah



sebesar 83,53 persen. Dibandingkan dengan target Angka Partisipasi Murni yang ditetapkan pada rencana tahun 2007, rata-rata Angka Partisipasi Murni pada semua jenjang pendidikan mencapai 102,15 persen.

Persentase Angka Partisipasi Kasar.

Angka Partisipasi Kasar menggambarkan tingkat partisipasi penduduk yang mengikuti kegiatan belajar di setiap jenjang pendidikan pada daerah tertentu ditunjukkan dengan formulasi perbandingan jumlah siswa yang bersekolah pada setiap jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan.

Pada tahun 2007, persentase Angka Partisipasi Kasar di Kota Surabaya untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebesar 105,20 persen, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebesar 99,51 persen dan untuk jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah sebesar 108,11 persen.

Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah di atas 100 persen disebabkan adanya siswa dari wilayah kabupaten/kota lain di sekitar Surabaya yang bersekolah di Surabaya. Dibandingkan dengan target Angka Partisipasi Kasar yang ditetapkan pada rencana tahun 2007, rata-rata Angka Partisipasi Kasar semua jenjang pendidikan mencapai 100,03 persen.

Jumlah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah negeri yang membebaskan SPP dan uang pangkal.

Sebagai upaya pemerataan pendidikan, Pemerintah Kota Surabaya memberikan penunjang bantuan operasional sekolah dan beasiswa Anak Usia Sekolah Kurang Mampu. Pada tahun 2007 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah negeri yang membebaskan SPP dan



uang pangkal sebanyak 602 sekolah yang terdiri dari 544 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, 58 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

c. Meningkatkan minat baca masyarakat.

Untuk mengukur tingkat minat baca masyarakat digunakan indikator angka kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Kunjungan tersebut dapat berupa peminjaman buku oleh masyarakat ataupun masyarakat yang membaca buku ke perpustakaan. Pada tahun 2007 jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 140.232 orang atau sebesar 111,96 persen dari target yang ditetapkan sebesar 125.250 orang.

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program penanganan bidang kesehatan dan keluarga berencana dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat diuraikan sebagai berikut:

Angka kematian bayi.

Pada tahun 2007, dari 7.051 jumlah kelahiran hidup terjadi 69 kematian bayi atau sebesar 9,79 per 1.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi tersebut lebih kecil dibandingkan dengan target angka kematian bayi kurang dari sama dengan 10 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu melahirkan.

Pada tahun 2007, dari 7.051 jumlah persalinan hidup terjadi 7 kematian ibu melahirkan atau sebesar 99,28 per 100.000 persalinan hidup. Angka kematian ibu melahirkan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan target angka kematian ibu melahirkan kurang dari sama dengan 125 per 100.000 kelahiran hidup.

Balita dengan status gizi buruk.

Dari 114.401 balita terdapat 2.239 balita gizi buruk atau sebesar 1,96 persen. Angka balita dengan gizi buruk melebihi target yang

ditetapkan kurang dari sama dengan 1 persen. Hal ini disebabkan belum semua balita dengan status gizi buruk dan gizi sedang mendapatkan pelayanan makanan tambahan.

Pada umumnya kasus balita gizi buruk terjadi pada masyarakat dengan status ekonomi sosial yang rendah. Selain itu, kasus balita gizi buruk juga bisa disebabkan penyakit bawaan dan infeksi.

Angka Kematian Kasar.

Angka Kematian Kasar pada tahun 2007 sebesar 0,33 persen artinya selama tahun 2007 terdapat 9.445 kematian dari seluruh jumlah penduduk.

3. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan ini diimplementasikan dalam tiga program yaitu :

a. Program pengelolaan dan pembangunan jalan dan jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan infrastruktur jalan dan jembatan. Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah nilai V/C ratio (derajat kejenuhan) jalan.

Nilai V/C ratio tahun 2007 menunjukkan angka 0,714, lebih kecil dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 0,9, hal ini menunjukkan bahwa kapasitas jalan yang ada masih mampu menampung jumlah kendaraan.

Atas upaya-upaya pengembangan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Surabaya dalam tahun 2007 memperoleh penghargaan tingkat nasional dari Departemen Pekerjaan Umum, yaitu Juara I "Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah atau PKPD Pekerjaan Umum, Sub Bidang Pengembangan Jalan dan Jembatan, Kategori Kota Metropolitan".



b. Program pengelolaan utilitas perkotaan.

Program ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan utilitas perkotaan seperti listrik, telepon, dan lain-lain sehingga diperoleh keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun sasaran dari program ini adalah perluasan jaringan dan pemasangan PJU.

Selama tahun 2007 telah terpasang PJU 5.299 titik dari target 2.458 titik atau mencapai 215 persen, sehingga sampai dengan tahun 2007 total pemasangan PJU sebanyak 31.591 titik, melebihi target yang ditetapkan sebesar 27.039 titik.

c. Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Program ini dimaksudkan untuk menurunkan ancaman bahaya banjir bagi warga Kota Surabaya. Terdapat tiga Indikator yang digunakan dalam pencapaian program ini yaitu:

Penurunan luas area genangan.

Realisasi penurunan luas area genangan tahun 2007 sebesar 105,80 ha dari target 253 ha atau mencapai 41,80 persen. Namun secara kumulatif penurunan luas area genangan sampai dengan tahun 2007 telah mencapai 2.825,20 ha dibandingkan target sebesar 2.678 ha.

Penurunan waktu genangan.

Realisasi penurunan waktu genangan air tahun 2007 selama 2,5 jam dari target selama 4 jam atau mencapai 137,5 persen. Pencapaian penurunan waktu genangan air tersebut tidak terlepas dari berfungsinya saluran drainase dan pompa air yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya.

Penurunan tinggi genangan.

Rata-rata tinggi genangan air di Kota Surabaya berkisar 40-60 cm. Realisasi penurunan tinggi genangan air tahun 2007 mencapai 27 cm dari target berkurangnya tinggi genangan yang hanya 20 cm atau mencapai 135 persen.

Atas berbagai upaya penanganan banjir yang telah dilaksanakan, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Surabaya memperoleh penghargaan tingkat nasional dari Departemen Pekerjaan Umum, sebagai “*Juara II Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum, Sub Bidang Drainase, Kategori Kota Metropolitan*”.

4. Penyelenggaraan Urusan Perumahan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui dua program yaitu:

a. Program Perumahan dan Permukiman

Sasaran yang akan dicapai pada program ini adalah meningkatnya kualitas permukiman dengan menggunakan indikator luas lingkungan permukiman yang ditangani/dibenahi.

Pada tahun 2007, target lingkungan permukiman yang ditangani/dibenahi seluas 1.700 ha, sedangkan realisasi seluas 3.267,18 ha, sehingga capaian kinerjanya 192,18 persen.

Atas berbagai upaya berkaitan dengan penanganan perumahan dan permukiman yang telah dilaksanakan, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Surabaya memperoleh penghargaan tingkat nasional dari Departemen Pekerjaan Umum, sebagai “*Juara I Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Pekerjaan Umum, Sub Bidang Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan*.”

b. Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Sasaran yang akan dicapai adalah penanganan kebakaran yang diukur dengan indikator waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran dan penurunan jumlah kejadian kebakaran. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program yaitu:

Waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran.

Pada tahun 2007, realisasi rata-rata waktu tempuh unit pemadam kebakaran sampai lokasi kebakaran adalah 18 menit. Sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2007 adalah 18 menit, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 persen.

Penurunan jumlah kejadian kebakaran.

Pada tahun 2007 diperkirakan akan terjadi kebakaran sebanyak 230 kejadian, akan tetapi jumlah kejadian kebakaran sebanyak 259 kejadian. Masih tingginya kejadian kebakaran di Kota Surabaya disebabkan kurangnya koordinasi dalam hal pemeriksaan dan pengawasan bangunan terkait dengan instalasi kelistrikan serta kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.

5. Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan penataan ruang dilaksanakan melalui Program Penataan Ruang dengan sasaran tersusunnya Rencana Tata Ruang yang aplikatif dan berwawasan lingkungan serta terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program yaitu:

Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Ruang Kota yang disusun pada seluruh wilayah kota Surabaya.

Pada tahun 2007 telah terpenuhi target penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota sebanyak dua Unit Pengembangan yaitu Wonokromo dan Tambak Osowilangun.

Target Rencana Teknik Ruang Kota yang disusun sebanyak lima Unit Distrik, dengan realisasi sebanyak enam Unit Distrik atau mencapai 120 persen, yaitu Darmo Satelit, Jajar Tunggal, Lontar, Lidah Kulon, Kalisari, dan Dupak dengan total luas sebesar 1.881,46 Ha.

Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB sesuai rencana tata ruang yang dikeluarkan.

Pencapaian indikator sasaran ini digunakan tolok ukur jumlah bangunan yang memiliki IMB. Realisasi penambahan bangunan yang memiliki IMB pada tahun 2007 adalah 5.066 unit atau mencapai 92,16 persen dibanding target sebanyak 5.497 unit.

Hal ini disebabkan antara lain karena belum optimalnya penyebaran informasi tentang persyaratan dan kelengkapan pengurusan IMB, kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB perlu ditingkatkan, adanya pengajuan IMB yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada serta pengajuan IMB pada bangunan yang sudah memiliki IMB untuk penambahan ruangan.

6. Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan urusan ini dilakukan melalui Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Adapun pencapaian sasaran diukur dengan menggunakan indikator yaitu:

Dokumen perencanaan yang dihasilkan tepat waktu.

Pada tahun 2007 terdapat tiga dokumen perencanaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Tahun 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2008 dan APBD Perubahan tahun 2007. Sedangkan empat dokumen lainnya yang masih belum dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan yaitu Kebijakan Umum APBD atau KUA Tahun 2008 serta KUA Perubahan Tahun 2007, Proritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS Tahun 2008 serta PPAS Perubahan Tahun 2007. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007.

Kegiatan yang sesuai waktu dan target perencanaan

Dari 1.154 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2007 telah selesai dilaksanakan sebanyak 1.057 kegiatan atau 91,59 persen. Keterlambatan penyelesaian kegiatan disebabkan oleh ketidaksesuaian kode rekening, harga satuan barang dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada triwulan IV serta terhambatnya pembebasan tanah.

Untuk meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan telah dilakukan upaya: membentuk Sekretariat Manajemen Proyek, penyediaan pusat *on line* bagi penyedia barang/jasa 24 jam, menyusun standar dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, serta menyusun standar kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Atas berbagai upaya peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Surabaya memperoleh pengakuan ISO 9001 : 2001 tentang *Quality Management System* atas layanan pengadaan barang/jasa via internet dan satu-satunya instansi pemerintah di Indonesia yang memperoleh pengakuan ISO 27001 : 2005 mengenai *Information Security and Management System*. Pengembangan Implementasi Sistem *e-Government* oleh Pemerintah Kota Surabaya telah diadopsi oleh berbagai instansi pemerintah dan sudah dilakukan penandatanganan MoU diantaranya dengan Departemen Luar Negeri, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Propinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Bogor dan beberapa Pemerintah Kabupaten lain di tanah air.

7. Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pengembangan transportasi dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatkan prasarana pendukung dan manajemen transportasi. Adapun pencapaian sasaran diukur dengan menggunakan dua indikator yaitu:

Kecepatan rata-rata kendaraan

Kecepatan rata-rata kendaraan di Kota Surabaya pada tahun 2007 adalah 34,93 km/jam atau melebihi kecepatan yang ditargetkan sebesar 30 km/jam.

Waktu tunggu penumpang

Realisasi waktu tunggu penumpang pada tahun 2007 mencapai 10,28 menit atau lebih cepat dari target 15 menit. Atas berbagai upaya pengembangan transportasi yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Surabaya memperoleh Penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha dalam penilaian Tertib Lalu Lintas dan Angkutan dari Departemen Perhubungan selama lima tahun berturut-turut.

8. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui tiga program pembangunan, yaitu :

a. Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas lingkungan kota. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Kualitas udara yang layak hirup

Realisasi jumlah hari dengan kualitas udara baik dan sedang dalam setahun pada tahun 2007 sebanyak 98,63 persen atau 360 hari dari target 96 persen atau 350 hari. Dengan demikian capaian kinerja terhadap peningkatan kualitas udara layak hirup adalah 102,74 persen.

Kualitas air

Dari hasil perhitungan pengambilan sampel air sumur yang memenuhi standar baku mutu, maka pada tahun 2007 nilai baku mutu kualitas air menghasilkan angka 20,295 persen dibandingkan dengan target standar baku mutu kualitas air yang ditargetkan pada tahun 2007 sebesar 20,2 persen, maka capaian kinerjanya sebesar 100,47 persen.

Jumlah perusahaan yang memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah.

Realisasi jumlah perusahaan yang memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah di tahun 2007 adalah 143 perusahaan dari target 141 perusahaan atau mencapai 101,42 persen

b. Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota

Penyelenggaraan urusan ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran meningkatnya ruang terbuka hijau diukur dengan menggunakan indikator luas ruang terbuka hijau yang dikelola Pemkot Surabaya. Target luas ruang terbuka hijau yang dikelola Pemkot Surabaya tahun 2007 seluas 269,58 Ha, sedangkan realisasinya mencapai 272,44 Ha, atau mencapai 101,06 persen.

c. Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pengelolaan sampah dan sumber sampah serta peningkatan kapasitas TPA. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Volume tumpukan sampah di TPS

Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2007, volume tumpukan sampah di TPS per hari maksimal 779,09 m³. Realisasinya pada tahun 2007 rata-rata volume tumpukan sampah di TPA mampu ditekan sampai 750 m³ per hari. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 103,73 persen.

Volume (berat) sampah yang masuk ke TPA

Target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2007, volume (berat) tumpukan sampah yang masuk ke TPA diharapkan maksimal 1.804 ton per hari, sedangkan realisasi kinerjanya jauh lebih baik yaitu 1.480 ton per hari. Dengan demikian capaian kinerjanya adalah 117,96 persen .

Dalam menangani pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Surabaya juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak baik

swasta (antara lain Media Jawa Pos, Radar Surabaya, PT Unilever dan lain-lain), masyarakat umum, Pemerintah Pusat, LSM, PKK dan Perguruan Tinggi.

Atas berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan lingkungan hidup pada tahun 2007 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penghargaan antara lain Piala Adipura, Adiwiyata, Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Juara I Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Pekerjaan Umum, Sub Bidang Penanganan Kebersihan dari Departemen Pekerjaan Umum.

Selain itu Pemerintah Kota Surabaya juga memperoleh penghargaan internasional dari UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific*) dan IGES (*Institute for Global Environmental Strategies*) untuk peningkatan kualitas lingkungan kota.

9. Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Sasaran yang akan dicapai pada program ini adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tertib administrasi kependudukan dengan indikator :

Penduduk memiliki Kartu Tanda Penduduk

Pada tahun 2007, penduduk yang seharusnya memiliki KTP di Kota Surabaya tercatat 2.197.348 jiwa dan ditargetkan 95 persen atau 2.087.481 jiwa wajib memiliki KTP. Sedangkan realisasi penduduk yang memiliki KTP sebanyak 1.865.014 jiwa atau 84,88 persen.

Penduduk memiliki Kartu Keluarga

Jumlah keluarga yang seharusnya memiliki Kartu Keluarga tercatat 952.557 Keluarga dan ditargetkan 90 persen atau 857.301 keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. Sedangkan realisasi yang memiliki Kartu Keluarga sebanyak 752.279 Keluarga atau 78,97 persen.



Bayi lahir memiliki Akte Kelahiran

Pada tahun 2007 tercatat 41.699 kelahiran dan ditargetkan 75 persen atau 31.274 bayi lahir yang memiliki Akte Kelahiran. Dari jumlah tersebut yang diurus Akte Kelahirannya sebanyak 40.796 kelahiran atau 97,83 persen.

Penerbitan Akte Kematian

Penerbitan Akte Kematian ditargetkan sebanyak 75 persen dari jumlah orang yang meninggal. Pada tahun 2007 tercatat 9.445 orang yang meninggal dan yang mengurus Akte Kematian sebanyak 1.942 orang atau 20,56 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran warga untuk mengurus Akte Kematian masih rendah, mengingat selama ini yang mengurus Akte Kematian hanya masyarakat yang memiliki kepentingan/tujuan tertentu misal untuk kepentingan pengurusan warisan.

- b. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dengan indikator:rata-rata tenggang waktu penyelesaian pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Kematian telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil.

Untuk penyelesaian pengurusan KTP membutuhkan waktu satu hari, Kartu Keluarga lima hari, Akte Kelahiran dan Akte Kematian sepuluh hari. Dengan asumsi semua persyaratan administrasi lengkap dan benar.

10. Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan serta Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak. Sasaran yang akan dicapai dalam program tersebut adalah menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya peran perempuan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini digunakan indikator sebagai berikut:

Penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada tahun 2007 tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami dalam keluarga meningkat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah kasus yang dilaporkan. Dari target 34 kasus, tercatat 191 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan seluruhnya telah ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya. Adapun bentuk penanganan yang dilakukan dengan memberikan konseling dan advokasi pada korban.

Organisasi perempuan yang dibantu.

Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Surabaya telah memberdayakan dan meningkatkan peran perempuan melalui pemberian bantuan pada 61 organisasi. Bantuan yang diberikan berupa bantuan finansial dan non-finansial seperti pelatihan keterampilan, fasilitasi kegiatan organisasi, penyuluhan kesejahteraan sosial, dan lain-lain.

11. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program penanggulangan kemiskinan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya penanganan keluarga miskin kota. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan dasar dengan indikator:

Pelayanan bantuan beras untuk keluarga miskin atau raskin.

Jumlah keluarga miskin yang tercatat di kota Surabaya pada tahun 2007 sebanyak 111.897 KK dan ditargetkan 100.708 KK atau 90 persen mendapatkan pelayanan bantuan raskin. Namun alokasi

APBN dan APBD untuk bantuan raskin hanya dapat mencukupi sebanyak 93.562 KK atau 83,61 persen.

Pelayanan dasar kesehatan.

Jumlah keluarga miskin yang tercatat memiliki kartu Asuransi kesehatan keluarga miskin atau Askeskin di Kota Surabaya sebanyak 111.223 KK dan pada tahun 2007 ditargetkan 90 persen atau 100.100 KK mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma. Realisasinya semua keluarga miskin yang memiliki kartu askeskin telah mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

b. Keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi

Pada akhir 2007 ditargetkan 55.612 keluarga miskin yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi sedangkan realisasinya mencapai 56.219 keluarga miskin atau 114,05 persen.

12. Penyelenggaraan Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program penanggulangan masalah sosial dengan sasaran meningkatnya pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. .

Keberhasilan program ini diukur melalui indikator jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang tertangani. Pada tahun 2006, PMKS yang dibina dan ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya sudah mencapai 10.639 PMKS. Selama tahun 2007 telah dilakukan pembinaan dan penanganan PMKS sebanyak 3.838 orang dari target 2.708 orang, sehingga sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan penanganan dan pembinaan PMKS sebanyak 14.477 orang.

13. Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pelayanan bidang ketenagakerjaan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator:



Tingkat Kesempatan Kerja

Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penempatan kerja sebanyak 3.579 orang atau 166,46 persen dari target sebanyak 2.150 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pada tahun 2007, jumlah pengangguran terbuka diperkirakan sebanyak 93.136 orang. Realisasi tingkat pengangguran terbuka sebesar 89.557 orang dari target 90.986 orang atau mencapai 101,41 persen.

Terbentuknya Kader Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada tahun 2007 jumlah kader keselamatan dan kesehatan kerja bertambah 28 kader dari target sebesar 24 kader atau 116,67 persen sehingga sampai dengan tahun 2007 sebanyak 889 kader dari target 906 kader atau 98,12 persen.

14. Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui:

a. Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Investasi

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kemandirian usaha mikro, kecil menengah atau UMKM dan koperasi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Persentase Penambahan Jumlah Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri

Pada tahun 2007 diharapkan terjadi penambahan investasi dari penambahan jumlah Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri sebanyak 4,5 persen. Adapun realisasi penambahan Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri sebanyak 28 perusahaan atau 4,54 persen yang terdiri dari 22 Penanam Modal Asing dan 6 Penanam Modal Dalam Negeri.



Dengan demikian sampai tahun 2007 jumlah Penanam Modal Asing dan Penanam Modal Dalam Negeri yang melakukan investasi di Kota Surabaya sebanyak 645 perusahaan.

Jumlah usaha mikro binaan

Sampai dengan tahun 2007 jumlah usaha mikro yang telah diberikan pembinaan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 3.026 unit atau 256,4 persen dari target yang ditetapkan sampai dengan tahun 2007 sebanyak 1.180 unit.

Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Tangguh dan Mandiri

Sampai dengan tahun 2007 jumlah UKM yang tercatat di Kota Surabaya sebanyak 6.653 UKM. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.294 UKM merupakan UKM dengan klasifikasi tangguh atau 115,86 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 1.980 UKM tangguh dan 749 UKM dengan klasifikasi mandiri atau 102,04 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 734 unit .

Jumlah koperasi skor baik

Sampai dengan tahun 2007 jumlah koperasi yang tercatat di Kota Surabaya sebanyak 1.372 unit dan dari jumlah tersebut sebanyak 551 unit merupakan koperasi berskor baik.

Atas upaya pembinaan koperasi yang telah dilakukan, pada tahun 2007 Pemerintah Kota Surabaya mendapatkan penghargaan Satya Lencana Koperasi dari Presiden Republik Indonesia sebagai pembina koperasi dan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM sebagai Kota Koperasi.

Peningkatan Kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar/ lembaga perbankan/ lembaga keuangan.

Setiap tahunnya direncanakan terjadi peningkatan kemitraan sebanyak 1 kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar/ lembaga perbankan/ lembaga keuangan. Pada tahun 2007 telah terjalin sebanyak 2 kemitraan yaitu kemitraan antara UMKM dengan PT Petrokimia dan CV. Poscho 100 di bidang pemasaran.

b. Program Penataan dan atau Pemberdayaan PKL.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya PKL yang dibina. Pada tahun 2007 terdapat 2.535 PKL yang dibina atau 101,4 persen dari target sebesar 2.500 PKL yang seharusnya dibina. Dengan demikian total PKL yang telah dibina sampai tahun 2007 sebanyak 8.962 PKL.

Upaya yang akan terus dilakukan dalam program penataan dan atau pemberdayaan PKL yaitu melakukan koordinasi antar-satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan pihak swasta untuk melakukan penertiban, merelokasi dan menata lokasi PKL yang tepat dan memberikan pemahaman kepada PKL.

15. Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program peningkatan kepariwisataan dan kebudayaan. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan urusan kebudayaan dan kepariwisataan adalah meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal serta meningkatnya kunjungan wisata. Adapun indikator capaian sasaran sebagai berikut:

Jumlah cagar budaya yang dilindungi.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya telah ditetapkan sebanyak 151 bangunan dan 10 situs cagar budaya yang dilindungi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Jumlah Padepokan Seni dan Budaya yang dibina

Pada tahun 2007 dari target yang ditetapkan sebanyak 60 lembaga seni, telah dilakukan pembinaan kepada 89 lembaga seni. Pembinaan yang dilakukan berupa pemberian kesempatan untuk tampil dalam festival budaya dan seni.

Persentase kenaikan pengembangan seni dan budaya lokal

Pada tahun 2007 terselenggara 270 event seni dan budaya atau sebesar 182,43 persen dari target 148 event. Event seni dan budaya

yang diselenggarakan terdiri dari 139 penyelenggaraan seni dan budaya lokal serta 131 penyelenggaraan musik/band.

Meningkatnya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Pada tahun 2007, wisatawan yang berkunjung ke Surabaya sebanyak 2.347.685 wisatawan. Kunjungan tersebut terdiri dari wisatawan domestik sebanyak 2.194.867 wisatawan atau 126,82 persen dari target sebesar 1.730.628, sedangkan wisatawan mancanegara sebanyak 152.818 wisatawan atau 107,30 persen dari target sebesar 142.417.

16. Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program peningkatan pembinaan kepemudaan dan olahraga. Program ini dimaksudkan untuk mencapai dua sasaran yaitu :

a. Meningkatnya Peran Generasi Muda

Indikator sasaran ini adalah persentase organisasi/pemuda yang berprestasi. Pada tahun 2007, terdapat 16 organisasi/pemuda yang berprestasi atau sebesar 5 persen dari 320 organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang ditargetkan dalam RPJMD.

b. Meningkatnya Prestasi Olahraga

Indikator sasaran ini adalah persentase *organisasi/personil* olahraga yang berprestasi. Pada tahun 2007, dari 43 cabang olahraga yang dibina oleh Pemerintah Kota Surabaya, sebanyak 27 cabang olahraga atau 62,79 persen mampu mencetak prestasi internasional maupun nasional.



17. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui dua program yaitu:

a. Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Sasaran program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator persentase penertiban terhadap pelanggaran Perda. Dari 10 jenis operasi penertiban terhadap 59.907 obyek penertiban yang diperkirakan melanggar, sebanyak 44.652 atau 74,54 persen dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran. Tindak lanjut yang diberikan antara lain berupa pemberian surat peringatan, pembongkaran bangunan, tindak pidana ringan dan lain-lain.

b. Program fasilitas pementapan multikultur.

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka memperkuat kerukunan warga kota. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar kelompok masyarakat. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan indikator:

Jumlah konflik masyarakat yang difasilitasi.

Pada tahun 2007 terjadi 182 aksi unjuk rasa yang berpotensi konflik di masyarakat mengenai masalah ekonomi, sosial budaya, maupun politik dan melibatkan masyarakat umum, buruh, mahasiswa, maupun organisasi masa lainnya. Seluruh aksi unjuk rasa telah difasilitasi oleh pemerintah Kota Surabaya dalam penyelesaiannya.

Penyelenggaraan forum antar kelompok masyarakat yang difasilitasi.

Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan forum antar kelompok masyarakat sebanyak 5 kali, atau sama dengan target yang ditetapkan, sehingga capaiannya

100 persen. Forum tersebut diikuti oleh tokoh-tokoh lintas agama serta tokoh-tokoh masyarakat.

18. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian

Penyelenggaraan urusan ini diimplementasikan melalui tujuh program, yakni :

a. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja

Sasaran program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator:

Indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur.

Indikator ini menggambarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kota Surabaya terhadap aturan hukum dan disiplin. Setiap tahunnya diharapkan jumlah pelanggaran hukum dan disiplin aparatur mengalami penurunan. Pada tahun 2005 terjadi pelanggaran sebanyak 440 kasus, sedangkan pada tahun 2007 berkurang menjadi 343 kasus.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.

Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan dan tanggung jawab dari obyek pemeriksaan atas hasil temuan Badan Pengawas dan aparat pengawas lainnya yang pengukurannya didasarkan atas jumlah rekomendasi atas temuan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh rekomendasi temuan.

Pada tahun 2007 jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan adalah 525 buah, dari jumlah tersebut rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai dengan akhir tahun adalah 446 buah atau 84,95 persen. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran disiplin aparatur pemerintah kota serta belum efektifnya pengawasan melekat.



b. Program peningkatan kinerja legislatif

Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja legislatif. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan dengan indikator sebagai berikut:

Rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan menjadi produk hukum.

Pada tahun 2007 dari 15 rancangan peraturan daerah yang diajukan, sebanyak 7 rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Jumlah *Public Hearing* yang dilaksanakan.

Pada tahun 2007, ditargetkan melaksanakan 3 kali *public hearing*, berkaitan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata. Sampai dengan akhir tahun 2007 telah dilaksanakan satu kali *hearing*/dialog dalam rangka perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata.

Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jumlah keluhan masyarakat yang diterima oleh lembaga legislatif sebanyak 320 keluhan. Dari jumlah tersebut sebanyak 252 keluhan telah ditindaklanjuti.

c. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Sasaran program ini adalah meningkatnya pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator:

Persentase Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2007 mencapai Rp 608.295.586.691 atau 104,03 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 584.742.410.284. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:



1. Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah pada tahun 2007 mencapai jumlah Rp 340.833.935.423,- atau 102,74 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 331.746.732.406,-.

2. Retribusi Daerah

Pada tahun 2007, penerimaan retribusi sebesar Rp 176.785.881.530,- atau mencapai 101,75 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 173.750.095.459,-.

3. Bagian Laba atas Penyertaan Modal/Investasi Pihak Ketiga

Pada tahun 2007 penerimaan bagian laba atas penyertaan modal sebesar Rp 38.385.988.072,- atau mencapai 101,60 persen dibandingkan target yang ditetapkan sebesar Rp 37.780.051.089,-.

4. Lain-lain PAD yang sah

Total penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2007 sebesar Rp 52.289.781.665,- atau mencapai 126,10 persen dibandingkan target yang ditetapkan sebesar Rp 41.465.531.330,-.

Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya

Sumber penerimaan daerah lainnya berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk tahun 2007 penerimaan dana perimbangan sebesar Rp 1.421.261.280.878 atau mencapai 121,08 persen dibandingkan target yang ditetapkan sebesar Rp 1.173.847.572.708.

Penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2007 sebesar Rp 247.115.791.087 berasal dari dana bagi hasil pajak dari propinsi serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pelayanan perijinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal

biaya maupun sistem dan prosedurnya. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator:

Rata-rata tenggang waktu penyelesaian ijin

Indikator dimaksudkan untuk menilai dan mengevaluasi sampai sejauh mana kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan. Target yang ditetapkan atas indikator tersebut adalah kurang dari 7 hari. Realisasi rata-rata penyelesaian ijin adalah kurang dari 7 hari. Sehingga capaian kinerjanya 100 persen.

Jumlah Kecamatan yang menerapkan pelayanan perijinan

Pelayanan IMB telah didesentralisasikan ke beberapa kecamatan. Kecamatan yang telah menerapkan pelayanan perijinan sebanyak 17 kecamatan. Sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 16 Kecamatan sehingga capaian kinerjanya 106,25 persen.

e. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sasaran program ini adalah meningkatnya tertib administrasi pemerintahan. Keberhasilan pencapaian sasaran diukur dengan indikator persentase urusan yang dilaksanakan kecamatan. Pada tahun 2007 sebanyak 68 urusan telah dilimpahkan ke Kecamatan dari 68 urusan yang ditetapkan .

f. Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas/Gedung Pemerintahan dan Pemerintah Daerah

Sasaran program tersebut adalah meningkatnya ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

Jumlah gedung pemerintah yang dibangun/diperbaiki.

Jumlah gedung/sarana pemerintah yang selesai dibangun/diperbaiki selama tahun 2007 sebanyak 426 gedung. Sedangkan target yang ditetapkan sebanyak 227 gedung, maka capaian indikator tersebut adalah 187,66 persen.

Jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola

Tambahan luas fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya tahun 2007 sebesar 1,6 Ha sedangkan target yang ditetapkan seluas 3,78 Ha sehingga capaian kinerja adalah 42,32 persen.

Namun demikian secara kumulatif sampai dengan tahun 2007 Pemerintah Kota Surabaya telah mengelola fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas 255,7 Ha atau mencapai 100,08 persen dari target 255,5 Ha.

Prestasi yang dicapai Pemerintah Kota Surabaya pada Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas/Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah penghargaan dari Departemen Pekerjaan Umum sebagai Juara I “Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah atau PKPD Pekerjaan Umum Sub Bidang Bangunan Gedung” dan Juara I “Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah atau PKPD Pekerjaan Umum Sub Bidang Pembinaan Jasa Kontruksi”.

g. Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur. Capaian program diukur dengan Indikator persentase pegawai yang melaksanakan tugas sesuai pendidikan dan pelatihan yang diikuti. Pada tahun 2007, dari 1.564 pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional/struktural sebanyak 1.380 pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang diikuti atau sebesar 88,24 persen, melebihi target yang ditetapkan sebesar 80 persen.

19. Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan urusan ini dilakukan melalui program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan sasaran meningkatnya tertib administrasi pemerintahan yaitu SKPD/unit kerja yang menerapkan sistem kearsipan pola baru.

Pada tahun 2007 dari target 10 SKPD/unit kerja yang menerapkan sistem kearsipan pola baru, sebanyak 9 SKPD yang telah menerapkan sistem kearsipan pola baru.

20. Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui dua program yaitu:

a. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran program ini adalah tersedianya pusat data dan informasi dalam sistem jaringan berbasis TI yang terintegrasi. Pencapaian sasaran tersebut dinilai melalui indikator:

Persentase sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sampai dengan tahun 2007 ditetapkan sebesar 42 persen atau setara dengan 13 sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Realisasinya mencapai 18 sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sehingga capaian kinerjanya sebesar 138,46 persen.

Persentase SKPD yang memiliki sistem data base yang terintegrasi

Integrasi data base bertujuan untuk meningkatkan efisiensi data sehingga antar SKPD dapat saling memanfaatkan *data base*. Sampai dengan tahun 2007 ditetapkan target sebesar 35 persen atau setara dengan 13 sistem database yang terintegrasi. Realisasinya mencapai 14 sistem database yang terintegrasi sehingga capaian kinerjanya sebesar 107,7 persen.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya sarana penyaluran informasi dan aspirasi publik. Pencapaian sasaran tersebut dinilai dengan indikator persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2007 terdapat 369 keluhan/aspirasi



masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Kota Surabaya, 350 keluhan diantaranya sudah ditindaklanjuti atau sebesar 94,85 persen. Dibandingkan dengan target sebesar 94 persen, maka capaian kinerja sasaran tersebut adalah 100 persen.

Dalam upaya pengelolaan teknologi informasi, Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2007 mendapatkan penghargaan dari e-Indonesia sebagai Juara I "Pengelolaan situs www.surabaya.go.id untuk Tingkat Kota se-Indonesia" dan juara II "Pengelolaan situs www.surabaya.go.id untuk Tingkat Pemerintahan se-Indonesia. Dari Warta Ekonomi mendapatkan Juara Terbaik 2 *e-Government Award*, Penghargaan *Special Achievement for IT Leadership* dan Penghargaan *Special Achievement for Public Service*.

21. Penyelenggaraan Urusan Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pengembangan kelautan, perikanan dan pertanian. Sasaran yang dicapai melalui program tersebut adalah meningkatnya hasil perikanan, kelautan, peternakan, pertanian dan ketersediaan pangan.

Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator-indikator sebagai berikut:

Jumlah produktivitas hasil perikanan budidaya udang

Pada tahun 2007, produksi udang dari tambak budidaya udang di wilayah Surabaya adalah 796,89 ton yang dihasilkan dari 1.002 Ha lahan tambak budidaya udang, sehingga rata-rata tingkat produktivitas perikanan budidaya udang adalah 795,30 Kg/Ha. Tingkat produktivitas tersebut melampaui target tahun 2007 sebesar 790 Kg/Ha atau mencapai 100,67 persen.

Jumlah produktivitas hasil pertanian berupa padi

Pada tahun 2007, rata-rata produksi padi per hektarnya adalah 54,34 kw/Ha, sedangkan target yang ditetapkan atas produktivitas hasil



pertanian adalah 51,32 kw/Ha, sehingga capaian kinerjanya 105,88 persen.

Jumlah hasil produk peternakan yang diawasi yaitu daging sapi, kambing, domba, babi dan ayam.

Pada tahun 2007 hasil peternakan yang diawasi berupa daging sapi, kambing, domba, babi, dan unggas sebanyak 53.759,9 ton. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 52.634,4 ton, jumlah tersebut mencapai 102,14 persen dari target yang telah ditetapkan.

Persentase ketersediaan bahan pangan

Pada tahun 2007, diharapkan terjadi penambahan ketersediaan bahan pangan khususnya beras sebesar 4 persen. Jumlah bahan pangan khususnya beras yang tersedia sebanyak 217.613 ton atau 102,4 persen dari target sebesar 212.489,18 ton.

D. TUGAS PEMBANTUAN

Disamping penyelenggaraan urusan desentralisasi, Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pada tahun 2007, Pemerintah Kota Surabaya telah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa departemen yang langsung ditujukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Tugas Pembantuan. Rincian Dana Tugas Pembantuan yang diterima adalah sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Program Upaya Kesehatan Perorangan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit, berupa pemenuhan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan di RSUD Dr. M. Soewandhie.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan untuk melaksanakan program ini terdiri dari pengembangan perbenihan/perbibitan Padi Non Hibrida, pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Pertanian, penyusunan/pengumpulan/ pengolahan/*updating*/ analisa data dan statistik, pembinaan dan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pembangunan pertanian (penyusunan *road map* pembangunan tanaman pangan), pengolahan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tanaman Pangan. Pelaksana tugas program ini adalah Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan.

3. Program Pengembangan Agribisnis

Program ini diarahkan untuk pengembangan pemasaran komoditas hortikultura khususnya tanaman hias yang masih memiliki potensi pasar. Pelaksana Tugas adalah Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan.

Guna peningkatan kinerja pelaksanaan program ini Pemerintah Kota Surabaya melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pertanian, sehingga selanjutnya lebih sesuai dengan kebutuhan Kota Surabaya.

4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kota Surabaya dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir, pemberdayaan ekonomi pesisir serta pembentukan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP). Pelaksana tugas adalah Dinas Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan.

5. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Kegiatan dalam melaksanakan program ini adalah Pemetaan Status Kerawanan Perusahaan serta Pembentukan Komite dan Penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pelaksana tugas adalah Dinas Tenaga Kerja.

E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi: kerjasama antar daerah; kerjasama daerah dengan pihak ketiga; koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; pembinaan batas wilayah; pencegahan dan penanggulangan bencana; pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

1. Kerjasama Antar Daerah

Pemerintah Kota Surabaya sebagai daerah otonom dituntut dapat menyediakan pelayanan publik yang optimal. Di samping itu juga diharapkan kreatif dan inovatif dalam mengelola sumberdaya bagi pembangunan ekonomi. Perbaikan pelayanan publik akan meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Salah satu kendala dalam peningkatan pelayanan publik dan pengembangan ekonomi daerah adalah keterbatasan kapasitas daerah (sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kelembagaan dan aset daerah). Salah satu inovasi untuk mengatasi masalah tersebut adalah kerjasama antar daerah.

Kerjasama antar daerah diyakini dapat menjadi media solusi dan integrasi untuk menyelesaikan masalah lintas daerah. Disamping itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan lintas daerah, serta menekan terjadinya konflik antar daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan berbagai upaya agar kerjasama dapat terus

berkembang dan bertambah melalui kegiatan kerjasama dalam negeri dan kegiatan kerjasama luar negeri.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Surabaya telah menjalin kerjasama antar daerah dengan 15 kota di dalam negeri, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Balikpapan, Kota Denpasar, Kota Bogor, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Propinsi Jambi), Kabupaten Tabalong, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Gorontalo, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lamongan, Kota Bandung, Kota Batam, Kota Banjarmasin, dan Kota Yogyakarta. Sedangkan dengan mitra di luar negeri, kerjasama pada umumnya dilakukan dalam bentuk kerjasama *sister city* yang telah dilakukan penandatanganan MoU dengan 5 kota di 4 negara yaitu Kota Seattle-Amerika Serikat, Kota Busan-Korea, Kota Kochi-Jepang, Kota Guangzhou dan Kota Xiemen-China. Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Kunming-China dan Marseille-Prancis yang telah direalisasikan dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LoI). Saat ini proses peninjauan masih terus dilakukan dengan Shah Alam-Malaysia dan Perth-Australia, Kota Surabaya juga melakukan kerjasama teknis bidang Lingkungan Hidup dengan Kitakyushu-Jepang.

Pada prinsipnya kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas mitra kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kabupaten/Kota di dalam dan di luar negeri, sehingga menjadi daerah regional yang terintegrasi serta dengan kota-kota di luar negeri, peningkatan kualitas SDM Kota Surabaya melalui pengiriman staf, pelajar dan warga masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, yaitu :

- a. Pelaksanaan kerjasama dengan Universitas Airlangga Surabaya, dewan melakukan fasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Berbasis Kinerja (KKN-BK).
- b. Meningkatkan kualitas kerjasama dalam program peningkatan perdagangan dan pariwisata dengan Pemerintah Kota Kochi-Jepang, Kota Busan-Korea, Kota Guangzhou dan Kota Xiamen-China serta Kota Yogyakarta.



- c. Keikutsertaan staf Pemerintah Kota Surabaya dalam pelatihan peningkatan kualitas perairan (Revitalisasi Kalimas) di Kota Kitakyushu Jepang yang diikuti dari unsur Staf Bappeko, Dinas Bina Marga dan Pematuan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Keikutsertaan Kota Surabaya pada Rakernas APEKSI dan Indonesia *City Expo*, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
- e. Keikutsertaan Kota Surabaya pada Musyawarah Komisariat Wilayah APEKSI di Kota Denpasar, Bali.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud dalam kerangka kerjasama ini adalah kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan kalangan swasta, koperasi, organisasi profesi, asosiasi, LSM, dan perguruan tinggi swasta.

Pada tahun 2007 Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya telah memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga, diuraikan sebagai berikut:

- a. *Stakeholder* Pariwisata dibidang kerjasama pengaturan parkir angkutan pariwisata khususnya parkir pada lokasi perhotelan, pusat perbelanjaan, obyek wisata, kantor pemerintah, kantor swasta dan bangunan cagar budaya
- b. Departemen Luar Negeri dibidang pengembangan dan implementasi sisten *e-Government*
- c. Departemen Perdagangan dan Perindustrian bidang pengembangan dan implementasi sistem *e-Government*
- d. Komando Pendidikan Angkatan Laut–KODIKAL kerjasama penghijauan dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan di KODIKAL
- e. BPKP Propinsi Jawa Timur kerjasama pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah
- f. PT. Antheus Indonesia kerjasama penyelenggaraan Pameran *Surabaya Fair*



- g. PT. Newcomm Indonesia kerjasama dalam penyelenggaraan Pameran Surabaya Flora Expo 2007
- h. KONI Surabaya kerjasama mengenai penghargaan terhadap atlet berprestasi di Kota Surabaya
- i. PT. KAI bidang penataan dan pemanfaatan lahan PT. KAI Daops VIII yang berada di wilayah Surabaya
- j. PT. Telkom (Persero) Divre V kerjasama pengembangan Surabaya Multimedia City-SMMC
- k. PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran V kerjasama penataan dan pembenahan taman eks SPBU Jl. A. Yani Surabaya
- l. Armatim, AAL, Monkasel, DPD Asita Jatim dan DPD HPI Jatim dalam hal penyelenggaraan paket wisata (*city tour*) nilai-nilai kepahlawanan dan kemaritiman bagi siswa SD, SMP dan SMA.
- m. *Netherlands Management Cooperation Project* (NMCP) dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, menghasilkan bantuan berupa pembuatan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) di lokasi pencucian ikan Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak.
- n. Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Timur mengenai Pendampingan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) dan pengembangan manajemen pemerintah daerah.

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dalam penyelenggaraan tertib pemerintahan otonomi daerah dan terwujudnya keberhasilan pembangunan telah dilaksanakan koordinasi dengan semua Instansi vertikal dan antar instansi vertikal yang meliputi Ekonomi, Politik, Sosial Budaya dan Hankam sesuai kewenangannya guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan pembangunan daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka koordinasi dengan Instansi vertikal ditekankan pada peningkatan koordinasi penyelenggaraan keagamaan, urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan moneter dan fiskal, urusan yustisi serta dalam hal penyelenggaraan pelayanan umum.

Koordinasi dengan instansi vertikal dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan instansi/departemen di pemerintah pusat terkait pelaksanaan tugasnya, diantaranya Departemen Luar Negeri, Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, BPK, BPKP, dan departemen lainnya. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Surabaya tetap memerlukan bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi.

Permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya terkait dengan koordinasi instansi vertikal antara lain: tidak seluruh instansi vertikal dalam melaksanakan kegiatannya melibatkan Pemerintah Kota Surabaya yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengalokasian anggaran dan program sehingga capaian program belum dapat sinergis serta belum sinkronnya aturan dan implementasi pelaksanaan mekanisme perencanaan program.

4. Pembinaan Batas Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka Pemerintah Kota Surabaya untuk mempermudah pelayanan dan perencanaan pembangunan serta mempermudah didalam pengawasan wilayah melaksanakan pematokan batas wilayah administrasi.

Berkaitan dengan kegiatan pemasangan patok batas wilayah telah dilakukan: penelitian dokumen, pelacakan batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta pembuatan peta batas. Pada tahun 2007 pemasangan patok batas wilayah meliputi:



- a. Kabupaten Gresik terbentang mulai dari batas antara Kelurahan Romokalisari (Kota Surabaya), Desa Tenggulung (Kabupaten Gresik), Kelurahan Waru Gunung (Kota Surabaya), Desa Bambe (Kabupaten Gresik) adalah 215 patok,
- b. Kabupaten Sidoarjo terbentang mulai dari batas antara Kelurahan Waru Gunung, Desa Krembangan (Kabupaten Sidoarjo), Kelurahan Gununganyar Tambak (Kota Surabaya), Desa Tambak Oso (Kabupaten Sidoarjo) adalah 155 patok,
- c. Patok batas wilayah antar Kelurahan yang sudah terpasang di Kota Surabaya berjumlah 240 patok pada 163 Kelurahan.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di Kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Pengungsi di Daerah, maka pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kota Surabaya telah dibentuk dengan Keputusan Walikota Surabaya yaitu :

- a. Keputusan Walikota No. 188.45/89/436.1.2/2007 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kota Surabaya yang diketuai oleh Walikota Surabaya mempunyai tugas untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat terhadap bencana sehingga korban dan penderitanya dapat dibatasi dan diperingan.
- b. Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/105/436.1.2/2007 tentang Pembentukan Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (RUPUSDALOPS PB) Kota Surabaya, yaitu ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana.
- c. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan



pengungsi di Surabaya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bakornas PBP dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PB, yang merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan Sejak sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana yang dimulai dengan Mitigasi, Kesiapsiagaan Tanggap Darurat dan Pemulihan.

Langkah antisipasi dan kesiapsiagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana antara lain:

- a. Memaksimalkan koordinasi antar anggota Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana yang diketuai Walikota Surabaya melalui rapat koordinasi rutin per triwulan dan insidentil pada saat kondisi-kondisi yang mendesak.
- b. Mengaktifkan Ruang Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana (Rupusdalops) selama 24 jam untuk mengantisipasi dan memantau kejadian bencana di Kota Surabaya yang bertempat di kantor Bakesbang Linmas dan dikoordinir oleh Kepala Bakesbang Linmas.
- c. Mengerahkan anggota Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat).
- d. Memberikan Perlindungan Masyarakat dengan mengadakan patroli daerah rawan genangan dan antisipasi lain penyebab bencana oleh petugas Rupusdalops bersama-sama dengan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
- e. Menyiapkan dan membekali 100 potensi masyarakat utusan dari Kecamatan dan kelurahan tentang pengetahuan dan ketrampilan penanggulangan bencana berupa Kursus Kader Pelaksana Linmas (Suskalak Linmas) dengan instruktur dari unsur TNI AL, Kepolisian, Tim SAR, PMI, BMG dan Pemerintah Kota Surabaya selama 12 hari di Pangkalan Udara Angkatan Laut (Lanud AL-Juanda) dengan materi antara lain: pertolongan pertama Gawat Darurat (PPGD), pertolongan pertama Bencana Alam (PPBA), dapur Umum, bongkar pasang tenda, kompas/navigasi darat dan lain-lain, *vertical rescue*, manajemen penanggulangan bencana, pengetahuan tentang pemadam kebakaran

- f. Mengadakan kerja bakti di lokasi daerah rawan banjir bersama-sama dengan instansi teknis antara lain Dinas Bina Marga dan Pematuan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan potensi masyarakat untuk peduli bencana melalui kegiatan Latihan Dasar dan Suskalak Linmas sebanyak 14.909 orang. Wilayah Surabaya potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah: musim hujan biasa terjadi pada Nopember sampai dengan Mei, dengan curah hujan terbanyak terjadi antara Januari sampai dengan Pebruari sehingga rawan genangan dan angin puting beliung, musim kemarau biasa terjadi pada Mei sampai dengan Oktober, yang merupakan puncak musim kemarau antara Agustus sampai dengan Oktober, sehingga pada Agustus sampai dengan Oktober rawan kekeringan dan kebakaran.

6. Pengelolaan Kawasan Khusus

Pemerintah Kota Surabaya tidak mengelola kawasan khusus sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai penjelasan Pasal 9 Ayat (1) yaitu kawasan khusus adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial budaya, lingkungan pertahanan dan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, kegiatan industri dan sebagainya.

7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dan komposisi penduduk majemuk dengan beragam latar belakang, Kota Surabaya berkepentingan untuk menjaga agar kondisi tetap aman dan damai untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya senantiasa



berupaya melakukan fasilitasi atas upaya-upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan damai dengan maksud untuk meningkatkan kepatuhan aparat pemerintah dan seluruh *stakeholder* terhadap peraturan daerah, serta dalam penyediaan perangkat hukum yang diperlukan.

Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat antara lain: penolakan warga sekitar atas pembangunan tempat ibadah (masjid, gereja), demonstrasi buruh akibat pemutusan hubungan kerja, pembebasan lahan warga, penertiban pedagang kaki lima (PKL), penertiban bangunan liar di stren kali serta, pelanggaran ijin tempat rekreasi atau hiburan umum (klub malam, diskotik). Berdasarkan basis konflik, kejadian pada tahun 2007 terdiri dari: suku adat ras dan agama (SARA sebanyak 8 kejadian), anarkhis (4 kejadian), separatis (2 kejadian), politik (29 kejadian), ekonomi (48 kejadian) dan sosial budaya (71 kejadian).

Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban tersebut, yaitu: kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang masih perlu ditingkatkan, koordinasi antar instansi baik vertikal maupun horizontal yang masih perlu ditingkatkan, kemampuan penguasaan teknik aparat penegak perda di lapangan masih perlu ditingkatkan, keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, adanya perlawanan dari masyarakat yang cenderung anarkis, adanya gugatan dan tuntutan (pidana, perdata, PTUN) dari pelanggar peraturan kepada Pemerintah Kota Surabaya, Adanya kemungkinan pihak ketiga yang menunggangi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, sangat hiterogennya masyarakat kota Surabaya (suku, agama, maupun budaya), masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, masih tingginya



kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang berakibat terjadinya konflik, kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perlu ditambahkan.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi gangguan ketentraman dan ketertiban, yaitu: melakukan koordinasi dengan jajaran aparat pengamanan dan instansi terkait, melakukan deteksi dini dan pengumpulan data terhadap hal-hal terkait dengan gangguan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai aturan hukum/peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan dan penindakan yang tegas terhadap pelanggar peraturan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak peraturan, melakukan pembenahan pranata hukum disesuaikan dengan kondisi pemerintah dan masyarakat, melakukan penertiban dalam rangka penegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan forum koordinasi antar kelompok masyarakat dan agama, memfasilitasi kegiatan pengamanan, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai politik, Ormas dan LSM. Upaya lainnya antara lain: menyelenggarakan kegiatan wawasan kebangsaan, penanggulangan yang telah dilakukan adalah melalui pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, sosialisasi cara berdemokrasi yang benar dan baik, pemahaman HAM, pembuatan data yang lebih akurat.

F. PENUTUP

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Surabaya.

Pemerintah Kota telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang



proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa, adanya kelengahan sedikit saja akan terlibas oleh arus dinamika dengan mobilitas yang sangat tinggi.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2007, merupakan kesinambungan dari penyelenggaraan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2007 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin menyampaikan masukan saran pendapat/tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui *Toll Free* Pengaduan Masyarakat (bebas pulsa) 0800-14041-22, www.surabaya.go.id atau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Jl. Pacar no. 8 Surabaya Telepon: 031-5312144 psw. 394, 605 Fax: 031 - 5344601.

Surabaya,

WALIKOTA SURABAYA

TTD

BAMBANG DWI HARTONO